

PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA



RENCANA KERJA TAHUN 2026



Alamat :

Jl. Provinsi Km.8
Komplek Islamic Center
Kelurahan Nipah-nipah
76141

dlh.penajamkab.go.id



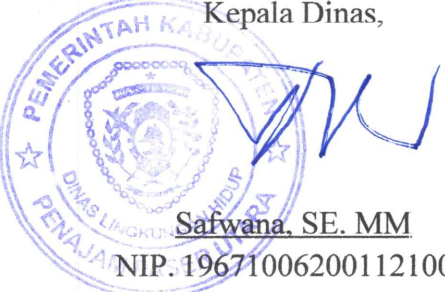
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat-Nya lah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 ini.

Dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini secara aktif telah melibatkan berbagai unsur pejabat structural yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga diharapkan rencana kerja ini sudah terbentuk sesuai kebutuhan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Semoga dengan tersusunnya rencana kerja ini bisa menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan program kegiatannya di tahun 2026, serta dapat mengoptimalkan kinerja dari kegiatan yang dilakukan.

Penajam Paser Utara, 15 Agustus 2025

Kepala Dinas,



Safwana. SE. MM
NIP. 196710062001121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	18
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup	40
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	60
BAB V PENUTUP	83
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	83
5.2 Kaidah Pelaksanaan	83
5.3 Rencana Tindak Lanjut	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2024 Kabupaten Penajam Paser Utara	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara	19
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara	25
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Penajam Paser Utara	37
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026	41
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Penajam Paser Utara	45
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja perangkat daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026. Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan

upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk melaksanakan isu strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2029 yaitu : ***“Peningkatan Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”***.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029.
 10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor xx tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam paser Utara Tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Adapun tujuan dari Penyusunan Akhir RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 terhadap RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

1. Acuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2029.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026.
3. Menjadi acuan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan Dokumen RENJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Misi, Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten penajam Paser Utara ini menyajikan dasar pengukur kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2024 dan perkiraan target capaian tahun 2025.

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, terdapat 11 program yang terlaksana yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 5 kegiatan, memiliki realiasi capaian kinerja sebesar 86% dengan realisasi anggaran sebesar 95,6%.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 kegiatan, memiliki realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96,1%.
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 kegiatan, memiliki realisasi capaian kinerja sebesar 99% dengan realisasi anggaran sebesar 94,7%
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati terdiri dari 1 kegiatan, memiliki realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 93.3%.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) terdiri dari 2 kegiatan, memiliki realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 86,1%.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari 1 kegiatan, memiliki realisasi capaian kinerja sebesar 53% dengan realisasi anggaran sebesar 98,6%.
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH terdiri atas 1 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja 0% dan realisasi anggaran sebesar 93,3%. Capaian kinerja pada program ini belum dapat tercapai karena tidak adanya potensi MHA yang teridentifikasi pada tahun 2024.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat terdiri dari 1 kegiatan, memiliki realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 88%.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 kegiatan, memiliki realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 77,8%.
10. Program Pengelolaan Persampahan, terdiri dari 1 kegiatan, memiliki capaian kinerja sebesar 70,99% dengan realisasi anggaran sebesar 97,5%.
11. Total capaian kinerja Renja tahun 2024 adalah sebesar 80,9% dengan realisasi anggaran sebesar 95,97%

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 ini disajikan dalam tabel rekapitulasi yang memuat informasi evaluasi kinerja Renja tahun 2024, prakiraan realisasi kinerja Renja tahun 2025 serta capaian kinerja Renstra tahun 2024-2026, sebagai berikut :

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2025	
										Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	85,9	100	86,11	86%	100	90,67	100%
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	100%
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	100%
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	42 Bulan	100%
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1554 Orang/Bulan	420 Orang/Bulan	560 Orang/Bulan	411 Orang/Bulan	79%	420 Orang/Bulan	1251 Orang/Bulan	81%
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	100%

	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	9 Dokumen	12 Bulan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	100%
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	20 Unit	60 Unit	90%

	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	100%	20 Unit	60 Unit	90%
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH, Rencana Induk Sampahan/RIP), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah/ DIKPLHD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100%
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,955	70,25	71,755	71,1	99%	71,855	71,855	100%
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,8	70,25	71,6	71,1	99%	71,7	71,7	100%
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pence- maran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabu- paten/Kota yang Dil- aksanakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
3	2	11	04			PROGRAM PENGE- LOAAN KEANE- KARAGAMAN HAYATI	Luas Kawasan KEHATI yang Terkelola	10 Ha	-	10 Ha	27 Ha	100%	10 Ha	10 Ha	100%
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keane- karagaman Hayati	Luas Kawasan KEHATI yang Terkelola	10 Ha	-	10 Ha	27 Ha	0%	10 Ha	10 Ha	100%
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Peneta- pan Rencana Pengel- olaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keane- karagaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasa- rana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3 Unit	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%
5	2	11	05			PROGRAM PENGEN- DALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Menghasilkan Limbah B3 yang Menyampaikan Laporan	10 %	-	10%	100%	100%	10%	10%	100%
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Dae- rah Kabupaten/Kota	Persentase usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang menyam- paikan laporan	10%	-	10%	100%	100%	10%	10%	100%

	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewangannya	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Capaian Pengawasan dan Pembinaan (%)	90%	100%	90%	90%	100%	80%	80%	100%
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengawasan dan Pembinaan	90%	100%	80%	42%	53%	80%	80%	100%

	2	11	06	2.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 Badan Usaha	-	38 Badan Usaha	16 Badan Usaha	42%	38 Badan Usaha	38 Badan Usaha	100%
8	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Teridentifikasinya Kawasan Masyarakat Hutan Adat (MHA)	1 MHA	-	-	-	-	1 MHA	1 MHA	100%
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Teridentifikasinya Kawasan Masyarakat Hutan Adat	1 MHA	-	-	-	-	1 MHA	1 MHA	100%
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

8	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Nominasi Penghargaan Kalpataru	1 Orang	-	1 Nominasi	0 Nominasi	0%	1 Nominasi	0 Nominasi	100%
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nominasi Penghargaan Kalpataru	1 Nominasi	-	1 Nominasi	0 Nominasi	0%	1 Nominasi	0 Nominasi	100%
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	-	2 Lembaga	0 Lembaga	0%	2 Lembaga	0 Lembaga	100%
9	2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan Adiwiyata (Sekolah/Lembaga)	2 Sekolah/Lembaga	1 Piala	1 Sekolah/Lembaga	15 Sekolah/Lembaga	100%	1 Sekolah/Lembaga	1 Sekolah/Lembaga	100%
	2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Adiwiyata (Sekolah/Lembaga)	2 Sekolah/Lembaga	1 Piala	1 Sekolah/Lembaga	15 Sekolah/Lembaga	100%	1 Sekolah/Lembaga	1 Sekolah/Lembaga	100%
	2	11	9	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	1 Entitas	15 Sekolah/Lembaga	15 Sekolah/Lembaga	100%	5 Entitas	5 Entitas	100%
9	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	10%	100%	10%	100%	100%	5%	5%	100%

	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Aduan yang Tertangani	10%	1 Dokumen	10%	100%	100%	5%	5%	100%
	2	11	10	2.01	0001	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	3 Pengaduan	-	3 Pengaduan	7 Pengaduan	100%	3 Pengaduan	3 Pengaduan	100%
10	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah	100%	51%	100%	71%	71%	100%	100%	100%
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah	100%	51%	100%	71%	71%	100%	100%	100%
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	26 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	42504,94 Ton	-	41968,58 Ton	14615 Ton	35%	29753 Ton	29753 Ton	100%
	2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	42504,94 Ton	-	41968,58 Ton	319,8 Ton	1%	12751 Ton	12751 Ton	100%
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100%	-	80%	4%	5%	80%	80%	100%

	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	42504,94 Ton	-	41968,58 Ton	279,74 Ton	1%	29753 Ton	29753 Ton	100%
	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	42504,94 Ton	-	41968,58 Ton	2299,24 Ton	5%	12751 Ton	12751 Ton	100%
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	42504,94 Ton	-	41968,58 Ton	18551,64 Ton	44%	29753 Ton	29753 Ton	100%

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan
Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2024
Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program mau pun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) berstatus ASN untuk menjadi *person in charge* (PIC) pada pekerjaan di masing-masing bidang.
- b. Kurangnya SDM berstatus ASN pada jabatan tertentu, yang menyebabkan program/ kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal.
- c. Kurangnya kompetensi dan keahlian SDM sehingga terbatas dalam pelaksanaan tugas-tugas baru.
- d. Kurangnya sarana prasarana operasional lapangan menghambat inventarisasi dan pembinaan lingkungan hidup.
- e. Kurangnya kajian-kajian lingkungan hidup yang menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal pelaksanaan urusan lingkungan hidup, maka peningkatan kinerja organisasi perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Capaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Lingkungan Hidup. Hasil analisis kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam tabel di bawah.

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			71,755	76,31	76,48	70,25	71,1	76,31	76,48	Terdapat perubahan target pada tahun 2025 dan 2026 dengan <i>gap</i> yang cukup jauh dengan target tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan cara perhitungan IKLH
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			100	100	100	85,9	86.11	100	100	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			-	74	76	71,51	73,5	74	76	
4	Persentase Timbulan Sampah Yang Terkelola			100%	100%	75%	57,62%	70,99%	100%	75%	Adanya penyesuaian target dikarenakan rendahnya capaian pada 2 tahun terakhir
5	Indeks Kualitas Air			59.36	67.24	67.44	50,95	49.47	67.24	67.44	Terdapat perubahan target pada tahun 2025 dan 2026 dengan <i>gap</i> yang cukup jauh dengan target tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan cara perhitungan IKA
6	Indeks Kualitas Udara			88.76	84.77	84.97	90,96	94.26	84.77	84.97	Terdapat perubahan target pada tahun 2025 dan 2026 dengan <i>gap</i> yang cukup jauh dengan target tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan cara perhitungan IKU

7	Indeks Kualitas Lahan			60.90	76.23	76.30	65,1	65.41	76.23	76.30	Terdapat perubahan target pada tahun 2025 dan 2026 dengan <i>gap</i> yang cukup jauh dengan target tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan cara perhitungan IKL
---	-----------------------	--	--	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	---

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Penajam Paser Utara

Dalam capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 di atas, masing-masing dapat dijabarkan sesuai dengan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan dari 50,95 menjadi 49,47.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan dari 90,96 menjadi 94,26.
3. Indeks Kualitas Tanah (IKL) mengalami peningkatan dari 65,1 menjadi 65,41.
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan dari 70,25 menjadi 71,1.
5. Pengelolaan timbulan sampah mengalami peningkatan dari 57,62% menjadi 70,99%.
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan dengan mengevaluasi proses perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pada perangkat daerah, mengalami peningkatan dari 71,51 menjadi 73,5.
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan menggunakan media survei kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari 85,9 menjadi 86,11.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 merupakan perangkat daerah yang bertugas melakukan urusan daerah dalam bidang urusan lingkungan hidup. Cakupan dari tugas ini meliputi pelayanan bidang persampahan, pencemaran lingkungan hidup, izin lingkungan, pengawasan dan pengaduan lingkungan hidup, perumusan kebijakan lingkungan hidup, dan tugas-tugas lainnya yang masih berhubungan dengan lingkungan hidup.

Pada tahun 2024, pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 70,99% dari target 100%. Capaian pengolahan sampah ini juga diikuti dengan pelaksanaan penilaian Adipura untuk tahun 2024, yang mana merupakan penilaian atas capaian pengelolaan sampah tahun 2023 hingga semester I tahun 2024. Selain itu, capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 adalah sebesar 71,1 dari target 71,755 yang merupakan target pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Capaian realisasi keuangan pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup terserap sebesar 96%, sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2024 mencapai 81%.

A. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup tak luput dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup selama tahun lalu dan harus diselesaikan adalah:

1. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup.
2. Belum Optimalnya Akses pelayanan lingkungan hidup secara Digital.
3. Belum Optimalnya sarana dan prasarana serta infrastruktur pada layanan persampahan.
4. Belum tersedianya kebijakan atau regulasi mengenai status baku mutu air (dokumen RPPMA).
5. Belum tersedianya kebijakan atau regulasi mengenai status baku mutu udara (dokumen RPPMU).
6. Belum Optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
7. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia dalam bidang lingkungan hidup terutama pengawas lingkungan dan penyuluh lingkungan.
8. Belum tersedianya kajian RPPLH dan RIP Kehati.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 disusun berdasarkan NSPK bidang urusan lingkungan hidup yang berlaku. Selain itu, arah kebijakan ini diselaraskan dengan rumusan arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Ada pun penyelarasan pada arah kebijakan pada RPJMD tahun 2025-2029 yaitu :

1. Perlindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui konservasi sumber daya alam dan lingkungan.
2. Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut dilaksanakan melalui penghambatan laju deforestasi, peningkatan restorasi hutan dan lahan gambut, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan.

3. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pengedukasian masyarakat, optimalisasi penerapan prinsip reduce, reuse dan recycle, penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
4. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan.
5. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2. Memperkuat pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Meningkatkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
4. Mendorong edukasi dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
5. Meningkatkan pelayanan publik dan kelembagaan bidang lingkungan hidup.
6. Membentuk kebijakan-kebijakan terkait bidang lingkungan hidup.

C. Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup seringkali dihadapi tantangan terutama dari luar sistem dan dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup sehingga mempengaruhi jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Adapun tantangan yang dimaksud adalah :

- a. Kerjasama antar pegawai dari masing-masing bidang teknis sebagai satu kesatuan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan perangkat daerah.
- b. Keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Tanggungjawab dan profesional dalam pelaksanaan tugas.

Peluang

Beberapa peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Lingkungan Hidup

dalam mencapai target kinerjanya, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan dan dukungan dari pimpinan daerah serta stakeholders yang terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan / mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Memanfaatkan sarana informasi untuk meningkatkan standar lingkungan hidup
- d. Meningkatkan pengawasan lingkungan hidup
- e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup untuk mengatasi berbagai tantangan Lingkungan Hidup ke depan

D. Formulasi Isu-isu penting Dinas Lingkungan Hidup

1. Peningkatan Indeks Kualitas Air.
2. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Peningkatan sarana prasarana persampahan guna mendukung pelayanan persampahan dalam rangka Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pintu gerbang Nusamtara.
4. Penyusunan dokumen perencanaan dan kajian lingkungan.
5. Peningkatan capaian pengelolaan sampah, terutama pada program pengurangan sampah dengan kampanye 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
6. Peningkatan SDM di Dinas Lingkungan Hidup, baik dalam sisi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (SDM Dinas Lingkungan Hidup).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) yang akan digunakan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan dalam 1 tahun periode. Penyusunan RKPD dimulai dari rancangan awal RKPD, di mana perangkat daerah menyusun usulan program dan kegiatan, indikator serta pagu anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program. Ada pun usulan perangkat daerah tersebut akan dilakukan asistensi dan review dari perangkat daerah pengampu program dan anggaran. Berikut hasil review rancangan RKPD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026:

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Ca- paian	Pagu Indi- katif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indi- katif	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76	5,847,241,879	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76	15,061,397,429	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	14 Dokumen	50,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	14 Dokumen	50,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	50,000,000	- Pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah tahun 2026 - Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD - Peningkatan kapasitas SDM bidang program perencanaan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	14 Bulan	4,942,605,768	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	14 Bulan	9,425,923,782	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	4,942,605,768	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	9,231,043,782	- Penyediaan gaji dan tunjangan untuk ASN Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tuhas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	194,880,000	- Penyediaan honorarium pengel-ola keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	90%	259,860,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	90%	240,860,000	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	- Penyediaan peralatan kelistrikan (lampu, kabel) untuk bangunan kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	- Penggandaan dan penjiilidan dokumen - Pencetakan spanduk kegiatan/ acara/ ucapan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	245 Dokumen	1,860,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	245 Dokumen	1,860,000	- Penyediaan peralatan kelistrikan (lampu, kabel) untuk bangunan kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	233,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	214,000,000	- Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dinas - Penyediaan makan minum agenda rapat/ kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang disediakan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	90%	383,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang disediakan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	90%	5,132,837,536	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	273,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	57,120,000	- Penyediaan alat tulis kantor untuk kebutuhan administrasi SKPD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	110,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	110,000,000	- Penyediaan sarana prasarana kantor untuk mendukung kegiatan operasional SKPD

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,965,717,536	- Penyediaan gaji tenaga harian lepas dan lembur THL lapangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	70%	211,776,111	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	70%	211,776,111	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	211,776,111	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	211,776,111	- Pemeliharaan sarana prasarana peralatan kantor - Pemeliharaan kendaraan operasional dinas - Pembayaran pajak kendaraan dinas
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	75%	-	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	75%	304,951,466	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dan penetapan KLHS kab/kota sesuai dengan NSPK	100%	-	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dan penetapan KLHS kab/kota sesuai dengan NSPK	100%	1,000,000	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	-	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1,000,000	- Penyusunan dokumen KLHS untuk penyusunan dokumen RPJMD
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/ kota sesuai dengan NSPK	100%	-	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/ kota sesuai dengan NSPK	100%	303,951,466	

Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	-	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	303,951,466	- Penyusunan dokumen RPPLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu kelas II untuk parameter pH	60%	250,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu kelas II untuk parameter pH	60%	255,000,000	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu kelas II	20 Titik	250,000,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu kelas II	20 Titik	255,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	250,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	29,200,000	- Koordinasi terkait pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1,000,000	- Pengusulan dan pembinaan desa/ kelurahan/ kelompok masyarakat untuk program kampung iklim (PROKLIM)
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	-	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	1,000,000	- Penginventarisasian data GRK

Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah,air, udara dan laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks kualitas lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks kualitas air laut)	38 Lokasi	-	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah,air, udara dan laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks kualitas lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks kualitas air laut)	38 Lokasi	220,800,000	- Pemantauan kualitas Air sungai, ambien udara dan tutupan lahan untuk penyusunan nilai IKLH - Bimtek lingkungan
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	-	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1,000,000	- Penyusunan dokumen SLHD (sebelumnya IKPLHD)
Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	5 Unit	-	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	5 Unit	1,000,000	- Penyediaan sarana prasarana pemantauan kualitas lingkungan
Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	-	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1,000,000	- Pengusulan pengadaan laboratorium lingkungan hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	65%	-	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	65%	2,000,000	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang terinventarisasi	3 Lokasi	-	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang terinventarisasi	3 Lokasi	2,000,000	
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	-	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1,000,000	- Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan KEHATI
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5 Unit	-	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5 Unit	1,000,000	- Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana KEHATI

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola di Kabupaten/ Kota	100%	-	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola di Kabupaten/ Kota	100%	1,000,000	
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha yang memiliki izin pengumpulan limbah B3	100%	-	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha yang memiliki izin pengumpulan limbah B3	100%	1,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1,000,000	- Pengawasan dan pendataan pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Kegiatan Berusaha Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (PUU LH)	60%	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Kegiatan Berusaha Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (PUU LH)	60%	202,000,000	

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan	90%	-	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan	90%	202,000,000	
Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	-	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	200,000,000	- Fasilitasi perizinan lingkungan untuk pengusulan TPST
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	25 Badan Usaha	-	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	25 Badan Usaha	2,000,000	- Pengawasan lingkungan pada kegiatan/ tempat usaha/ perusahaan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	Persentase SDM Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	60%	-	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	Persentase SDM Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	60%	1,000,000	

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nominasi Penghargaan Kalpataru	1 Nominasi	-	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nominasi Penghargaan Kalpataru	1 Nominasi	1,000,000	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	-	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	1,000,000	- Pengusulan dan pembinaan nominasi kalpataru tahun 2026
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup yang diterima lembaga/ masyarakat	80%	-	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup yang diterima lembaga/ masyarakat	80%	100,000,000	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Adiwiyata	5 Penghargaan	-	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Adiwiyata	5 Penghargaan	100,000,000	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	100,000,000	- Pengusulan dan pembinaan calon sekolah adiwiyata

Pengelolaan Lingkungan Hidup				Pengelolaan Lingkungan Hidup				
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100%	-	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100%	1,000,000	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang tertangani	100%	-	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang tertangani	100%	1,000,000	
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	-	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	1,000,000	- Penanganan terkait laporan aduan masyarakat terkait kerusakan/ pencemaran lingkungan
PROGRAM PENGEL-OLAAN PER-SAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	75%	3,700,000,000	PROGRAM PENGEL-OLAAN PER-SAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	75%	6,806,000,000	
Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah dengan kegiatan penanganan sampah	70%	3,700,000,000	Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah dengan kegiatan penanganan sampah	70%	6,803,000,000	
	Persentase pengelolaan sampah dengan kegiatan pengurangan sampah	30%	-		Persentase pengelolaan sampah dengan kegiatan pengurangan sampah	30%	3,000,000	

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	400,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	2,000,000,000	- Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Persampahan
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	301,000,000	- Penyusunan Rencana Induk Persampahan dan Jakstrada
Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	25 Unit	-	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	25 Unit	600,000,000	- Pemeliharaan sarana prasarana persampahan
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	20.000 Ton	-	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	20.000 Ton	1,000,000	- Penanganan sampah melalui pengangkutan
Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	6%	-	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	6%	1,000,000	- Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	300 Ton	-	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	300 Ton	600,000,000	- Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah Sesuai Dengan Peraturan Perundangan

Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	-	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	1,000,000	- Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	20.000 Ton	3,300,000,000	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	20.000 Ton	3,300,000,000	- Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA - BBM Operasional Persampahan
Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	320 Ton	-	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	320 Ton	1,000,000	- Pengurangan Sampah Melalui pemanfaatan kembali sampah
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	4.400 Ton	-	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	4.400 Ton	1,000,000	- Pengurangan Sampah Melalui Pendauran Ulang
TOTAL			9,797,241,879				22,734,348,895	

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Penajam Paser Utara

Review atas rancangan awal di atas sesuai dengan analisis kebutuhan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun anggaran 2026, dengan memperhatikan potensi kenaikan harga barang dan juga penambahan program kegiatan. Selanjutnya hasil review di atas akan dicermati lagi oleh perangkat daerah pengampu perencanaan, melihat kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah khususnya bidang lingkungan hidup. Ada pun temuan-temuan terkait hasil review ini termasuk di antaranya adanya program dan kegiatan yang belum mendapat porsi pagu anggaran pada rancangan awal RKPD 2026, sehingga perlu dicermati dan ditambahkan pagu pada program dan kegiatan tersebut. Selain itu, perlunya penambahan sarana prasarana pada bidang persampahan untuk mendukung target capaian pengelolaan sampah pada tahun 2026, penyusunan kebijakan persampahan terbaru dan perencanaan pembangunan TPST sebagai solusi atas hampir penuhnya kapasitas TPA Buluminung. Selain itu, perlunya penyusunan dokumen RPPLH untuk mendukung pengambilan kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup disusun berdasarkan isu-isu lingkungan di sekitar serta kebutuhan bidang-bidang pengampu dalam melaksanakan program kerjanya. Selain itu Rencana Kerja ini juga disusun atas usulan program maupun kegiatan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebelum diterima oleh perangkat daerah, usulan-usulan dari Masyarakat ini harus melewati beberapa tahapan verifikasi, sesuai dengan alur pengajuannya, mulai dari verifikasi kelurahan/desa hingga verifikasi perangkat daerah, yang mana jika telah terverifikasi di perangkat daerah, usulan-usulan tersebut dapat dibawa ke Musrenbang Provinsi. Pada penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026, terdapat beberapa usulan kegiatan dari Masyarakat yang terpantau pada aplikasi SIPD RI, namun sampai akhir pengajuan, usulan-usulan itu belum dapat diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan masih kurangnya kelengkapan data yang diperlukan untuk dapat diverifikasi. Hal ini menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat melakukan verifikasi atas usulan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026.

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Penajam Paser Utara

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026, diperlukan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional khususnya di bidang lingkungan hidup. Telaahan ini menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang sinergis dengan rencana pembangunan jangka menengah serta prioritas nasional, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Secara nasional, kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, yang mana termuat dalam Prioritas Nasional 2 pada sasaran ke-6 yang bertajuk “*Terwujudnya transformasi ekonomi hijau.*” Arah kebijakan nasional terkait lingkungan hidup yaitu :

1. Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati, mengoptimalkan pemanfaatan berkelanjutan, dan memperkuat tata kelola keanekaragaman hayati yang diselaraskan dengan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025–2045. Pengembangan area preservasi dapat diwujudkan melalui penguatan tata Kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi yang terintegrasi. Rencana dan strategi yang dapat mendukung arah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati tersebut dalam lima tahun ke depan diwujudkan melalui (a) perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (b) pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (c) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (d) pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi; serta (e) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.

2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dilakukan untuk memastikan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, arah kebijakan ini juga akan memastikan penataan ruang yang berkeadilan untuk mencapai seluruh target pembangunan nasional. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (b) peningkatan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota; (c) peningkatan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (d) peningkatan kualitas lahan; (e) peningkatan kualitas ekosistem gambut; (f) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan limbah radioaktif; (g) penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan dan penataan ruang; serta (h) penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup.
3. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, yang mencakup seluruh rantai layanan (pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir) yang disertai dengan penguatan serta penegakkan hukum dan peraturan, dilakukan dengan menjadikan sampah sebagai arus utama di berbagai tingkat dan fungsi pemerintahan dengan pembagian wewenang yang *clean and clear*, serta dengan memastikan tersedianya seluruh norma, standar, prosedur dan kriteria yang dibutuhkan dan dijalankan dengan koherensi dan konsistensi dari mulai tahap perencanaan sampai dengan operasional dan pemeliharaan serta penguatan pengelolaan aset. Reformasi dilakukan sejak hulu yaitu melalui perubahan perilaku seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi sampah yang diawali dari pemucuan, pemilahan, dan pengurangan sampah yang harus konsisten dan terintegrasi dengan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang terpilah, dan serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna sesuai kondisi masing-masing daerah. Selain itu, di hilir dilakukan optimalisasi pengolahan sampah berupa penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*-Pusat Daur Ulang-Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, *maggot/black soldier fly*, *refuse derived fuel*, *waste to energy*, pirolisis, dan lain-lain), dan pengintegrasian sektor informal; optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan memastikan *off-taker* hasil olahan sampah, penataan sistem pengelolaan lindi dan gas metana, konservasi tempat pemrosesan akhir dengan *landfill mining* serta pembatasan tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu sehingga hanya residu masuk

ke tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu yang menerapkan sistem *sanitary landfill*.

Sebagai implikasi dari kebijakan nasional tersebut, Dinas Lingkungan Hidup perlu menyusun program dan kegiatan yang mendukung target-target pembangunan nasional, antara lain:

1. Merencanakan penyusunan kajian-kajian lingkungan hidup seperti dokumen RPPLH, Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang berfungsi sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/ kota.
2. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga.
3. Merencanakan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas lingkungan hidup di kabupaten/ kota, terutama pada kegiatan yang dapat menaikkan capaian IKLH sebagai parameter kualitas lingkungan hidup di daerah.

Dengan demikian, program dan kegiatan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup disusun secara sinergis dan selaras dengan arah kebijakan nasional, memperhatikan potensi dan permasalahan lingkungan hidup di daerah, serta menjamin terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029. Disajikan dalam tabel, capaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tahun 2024	Prakiraan Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,1	76,31	71,48
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	49.47	67.24	67.44
			Indeks Kualitas Udara	94.26	84.77	84.97
			Indeks Kualitas Lahan	65.41	76.23	76.30
		Peningkatan kualitas Pengelolaan Sampah dan limbah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	72,1	72,5	73
		Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup	Nilai AKIP	73,5	74	76
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,11	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan hingga sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 telah disusun sesuai telaahan dan diskusi masing-masing bidang pengampu dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang mana berasal dari program kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, serta isu dan prakiraan kebutuhan daerah dalam satu tahun mendatang. Oleh karena itu, disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan rencana-rencana program, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 meliputi 10 Program, 15 Kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub

kegiatan yang digunakan dalam rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 3) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
 - 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - 5) Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
 - 6) Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
 - 7) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
- 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**
- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota**
- 1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - 2) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**
- a. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
- 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
- a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**
- 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - 2) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- 1) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

10. Program Pengelolaan Persampahan

a. Pengelolaan Sampah

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
- 3) Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
- 4) Penanganan sampah melalui pengangkutan
- 5) Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
- 6) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
- 7) Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
- 8) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional
- 9) Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
- 10) Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP			29.197.972.071					35.915.313.374
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			29.197.972.071					35.915.313.374
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			29.197.972.071					35.915.313.374
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76	12.955.900.000				77,5	17.752.490.000
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	14 Dokumen	90.000.000				14 Dokumen	100.000.000
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	90.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7 Dokumen	100.000.000
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	14 Bulan	5.000.000.000				14 Bulan	9.000.000.000

	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	5.000.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		77 Orang/Bulan	9.000.000.000
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tuhas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	-	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Dokumen	-
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	90%	455.900.000				90%	501.490.000
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Paket	6.600.000

	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	28.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Paket	30.800.000
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	245 Dokumen	1.900.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		245 Dokumen	2.090.000
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	420.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Laporan	462.000.000
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang disediakan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	90%	7.195.000.000				90%	7.914.500.000

	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	280.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Laporan	308.000.000
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	315.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Laporan	346.500.000
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.600.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Laporan	7.260.000.000
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	70%	215.000.000				70%	236.500.000
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	215.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		45 Unit	236.500.000

										Kel/Des a				
2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomen- dasi hasil kajian ling- kungan hidup yang di tindaklanjuti	75%	700.000.000				80%	600.000.000
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strate- gis (KLHS) Kabu- paten/Kota	Persentase penyusunan dan penetapan KLHS kab/kota sesuai dengan NSPK	100%	200.000.000				100%	200.000.000
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksa- naan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabu- paten/Kota yang Disusun	1 Doku- men	200.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Doku- men	200.000.000
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ling- kungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/ kota sesuai dengan NSPK	100%	500.000.000				100%	400.000.000
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Ka- bupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir ara- han RPPLH Provinsi	1 Doku- men	500.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Doku- men	400.000.000

3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu kelas II untuk parameter pH	60%	2.600.000.000				65%	3.005.000.000
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu kelas II	20 Titik	2.600.000.000				20 Titik	3.005.000.000
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	500.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	600.000.000
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	150.000.000
	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	200.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	200.000.000

	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah,air, udara dan laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks kualitas lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks kualitas air laut)	38 Lokasi	100.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		40 Lokasi	120.000.000
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	150.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	150.000.000
	2	11	03	2.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	5 Unit	1.500.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	1.700.000.000
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	50.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	85.000.000

4	2	11	04			PROGRAM PENGEL- OLAAN KEANE- KARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	65%	600.000.000				75%	660.000.000
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keane- karagaman Hayati Kabu- paten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang terinventarisasi	3 Lokasi	600.000.000				3 Lokasi	660.000.000
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Peneta- pan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengel- olaan Kehati yang Disusun	1 Doku- men	500.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Doku- men	550.000.000
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keane- karagaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keane- karagaman Hayati yang Dikelola	5 Unit	100.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Unit	110.000.000
5	2	11	05			PROGRAM PENGEN- DALIAN BAHAN BER- BAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola di Ka- bupaten/ Kota	100%	20.679.800				100%	31.019.700
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha yang memiliki izin pengum- pulan limbah B3	100%	20.679.800				100%	31.019.700

	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	20.679.800	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	31.019.700
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Kegiatan Berusaha Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (PUU LH)	60%	42.685.170			65%	50.000.000
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan	90%	42.685.170			90%	50.000.000

	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	-	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	-
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	25 Badan Usaha	42.685.170	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		22 Badan Usaha	50.000.000
8	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase SDM Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	60%	19.611.150				65%	23.500.000
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nominasi Penghargaan Kalpataru	1 Nominasi	19.611.150				1 Nominasi	23.500.000

	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	19.611.150	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Lembaga	23.500.000
8	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup yang diterima lembaga/ masyarakat	80%	267.374.550				85%	307.500.000
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Adiwiyata	5 Penghargaan	267.374.550				16 Penghargaan	307.500.000
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	267.374.550	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Entitas	307.500.000
9	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100%	76.022.150				100%	87.500.000
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang tertangani	100%	76.022.150				100%	87.500.000

	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	76.022.150	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7 Pengaduan	87.500.000
10	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PER-SAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	75%	11.915.699.251				75%	13.398.303.674
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah dengan kegiatan penanganan sampah	70%	11.298.608.609				70%	12.748.929.400
							Persentase pengelolaan sampah dengan kegiatan pengurangan sampah	30%	617.090.642				30%	649.374.274
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	4.773.931.769	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Unit	5.490.021.534
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	650.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	750.000.000

	2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	25 Unit	1.650.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		25 Unit	1.650.247.500
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	20.000 Ton	20.679.800	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		21.000 Ton	23.781.770
	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	6%	215.113.400	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10%	247.380.410

	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	300 Ton	747.390.640	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		340 Ton	859.781.236
	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	13.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	14.950.000
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	20.000 Ton	3.241.493.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		21.000 Ton	3.727.716.950

	2	11	11	2.01	0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	320 Ton	3.941.800	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	356 Ton	5.500.000
	2	11	11	2.01	0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	4.400 Ton	600.148.842	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6.000 Ton	628.924.274
	J U M L A H								29.197.972.071				35.915.313.374

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Penajam Paser Utara

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 disusun berdasarkan rancangan program kegiatan dan anggaran yang telah melalui tahapan akhir RKPD. Total pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 adalah sebesar Rp22.734.348.895,- yang mana bersumber dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara. Rincian belanja Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 beserta dengan target kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Ke-lompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Pe-nanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP						22.734.348.895							29.796.000.000		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						22.734.348.895							29.796.000.000		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						22.734.348.895							29.796.000.000		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP	80,5	73,5	74	76 Angka	15.061.397.429						77,5	17.041.000.000		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	70 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	14 Dokumen	50.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Lingkungan Hidup	14 Dokumen	70.000.000		
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Lingkungan Hidup	7 Dokumen	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	70 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	9.425.923.782			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Membangun Sektor Pendidikan Pemantapan Kualitas SDM	Dinas Lingkungan Hidup	14 Bulan	9.200.000.000	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	385 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	74 Orang/Bulan	74 Orang/bulan	9.231.043.782	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALO-KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Membangun Sektor Pendidikan Pemantapan Kualitas SDM	Dinas Lingkungan Hidup	77 Orang/Bulan	9.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	-	-	4 Dokumen	194.880.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya Saing	Dinas Lingkungan Hidup	4 Dokumen	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	100 Persen	90 Persen	90 Persen	240.860.000			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Lingkungan Hidup	90 Persen	441.000.000	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	5.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Lingkungan Hidup	2 Paket	8.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Ce- takan dan Penggandaan yang Dise- diakan	20 Paket	1 Paket	4 Paket	4 Paket	20.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmo- nis dengan lingkungan, alam, dan bu- daya serta peningkatan toleransi antarumat be- ragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Pening- katan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akunta- bel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Ling- kungan Hidup	4 Paket	30.000.000	DINAS LING- KUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe- rundang-Un- dangan yang Disediakan	1225 Dokumen	245 Doku- men	245 Doku- men	245 Doku- men	1.860.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmo- nis dengan lingkungan, alam, dan bu- daya serta peningkatan toleransi antarumat be- ragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Pening- katan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akunta- bel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Ling- kungan Hidup	245 Doku- men	3.000.000	DINAS LING- KUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyeleng- garaan Rapat Koordinasi dan Kon- sultasi SKPD	60 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	214.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmo- nis dengan lingkungan, alam, dan bu- daya serta peningkatan toleransi antarumat be- ragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Pening- katan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akunta- bel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Ling- kungan Hidup	12 Laporan	400.000.000	DINAS LING- KUNGAN HIDUP

2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang disediakan dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen	100 Persen	90 Persen	90 Persen	5.132.837.536			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Lingkungan Hidup	90 Persen	7.030.000.000	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	57.120.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Lingkungan Hidup	4 Laporan	280.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	110.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Lingkungan Hidup	4 Laporan	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.965.717.536	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan	6.600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	70 Persen	100 Persen	70 Persen	70 Persen	211.776.111			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Lingkungan Hidup	70 Persen	300.000.000	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	198 Unit	18 Unit	18 Unit	20 Unit	211.776.111	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Dinas Lingkungan Hidup	45 Unit	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	90 Persen	-	70 Persen	75 Persen	304.951.466						80 Persen	700.000.000	
2	11	02	2.01		Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota sesuai dengan NSPK	90 Persen	-	100 Persen	100 Persen	303.951.466			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	100 Persen	200.000.000	
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
						jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	303.951.466	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dan penetapan KLHS kab/kota sesuai dengan NSPK	100 Persen	-	100 Persen	100 Persen	1.000.000			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	100 Persen	500.000.000	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
						Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi status mutu tercemar ringan	75 Persen	-	60 Persen	60 persen	255.000.000						65 Persen	2.620.000.000	

2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu kelas II untuk parameter pH	75 Persen	-	60 Persen	60 persen	255.000.000			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	65 Persen	2.620.000.000	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.200.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	1 Dokumen	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														

						Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
						Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	204 Lokasi	38 Lokasi	38 Lokasi	38 Lokasi	220.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	40 Lokasi	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
						Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam Bingkai Keberagaman	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	1 Dokumen	120.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota														

						Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pence- maran ling- kungan	5 Unit	-	1 Unit	5 Unit	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmo- nis dengan lingkungan, alam, dan bu- daya serta peningkatan toleransi antarumat be- ragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pening- katan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Ling- kungan Hidup, Masyara kat	1 Unit	1.500.000.000	DINAS LING- KUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
						Jumlah peng- ujian yang dilaksanakan oleh labora- torium ling- kungan	5 Doku- men	-	1 Doku- men	1 Doku- men	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmo- nis dengan lingkungan, alam, dan bu- daya serta peningkatan toleransi antarumat be- ragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pening- katan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Ling- kungan Hidup, Masyara kat	1 Doku- men	50.000.000	DINAS LING- KUNGAN HIDUP
2	11	04			PROGRAM PENGEL- OLAN KEANE- KARAGAMAN HAYATI (KE- HATI)	Persentase RTH yang dikelola	85 Persen	-	65 Persen	70 Persen	2.000.000						75 Per- sen	600.000.000	

2	11	04	2.01		Pengelolaan Keane- karagaman Hayati Kabu- paten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang terinventar- isasi	5 Lokasi	-	3 Lokasi	3 Lokasi	2.000.000			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmo- nis dengan lingkungan, alam, dan bu- daya serta peningkatan toleransi antarumat be- ragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pening- katan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Ling- kungan Hidup, Masyara kat	3 Lokasi	600.000.000	
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
						Jumlah Dokumen Rencana In- duk Pengel- olaan Kehati yang Disusun	5 Doku- men	-	1 Doku- men	1 Doku- men	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmo- nis dengan lingkungan, alam, dan bu- daya serta peningkatan toleransi antarumat be- ragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pening- katan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Ling- kungan Hidup, Masyara kat	1 Doku- men	500.000.000	DINAS LING- KUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
						Jumlah Sa- rana dan Prasarana Keane- karagaman Hayati yang Dikelola	25 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmo- nis dengan lingkungan, alam, dan bu- daya serta peningkatan toleransi antarumat be- ragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pening- katan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Ling- kungan Hidup, Masyara kat	5 Unit	100.000.000	DINAS LING- KUNGAN HIDUP

2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola di Kabupaten/ Kota	100 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	1.000.000						100 Persen	25.000.000	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha yang memiliki izin pengumpulan limbah B3	100 Persen	-	100 Persen	100 Persen	1.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	100 Persen	25.000.000	
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	1 Dokumen	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

						Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya												
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Kegiatan Berusaha Terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (PUU LH)	75 Persen	-	60 Persen	60 Persen	201.000.000					65 Persen	125.000.000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan	100 Persen	42,11 Persen	90 Persen	90 Persen	201.000.000		Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	90 Persen	125.000.000	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													

						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	25 Dokumen	-	5 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	5 Dokumen	80.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	114 Badan Usaha	16 Badan Usaha	20 Badan Usaha	25 Badan Usaha	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	22 Badan Usaha	45.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase SDM Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	75 Persen	-	55 Persen	60 Persen	1.000.000						65 Persen	25.000.000	

2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nominasi penghargaan kalpataru	5 Nominasi	-	1 Nominasi	1 Nominasi	1.000.000			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	1 Nominasi	25.000.000	
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
						Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	-	1 Lembaga	1 Lembaga	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	2 Lembaga	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup yang diterima lembaga/ masyarakat	95 Persen	88,24 Persen	75 Persen	80 Persen	100.000.000						85 Persen	270.000.000	

2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Adiwiyata	81 Penghargaan	15 Penghargaan	15 Penghargaan	5 Penghargaan	100.000.000			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	16 Penghargaan	270.000.000	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	81 Entitas	15 Entitas	15 Entitas	5 Entitas	100.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	16 Entitas	270.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100 Persen	-	100 Persen	100 Persen	1.000.000						100 Persen	80.000.000	

2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.000.000			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	100 Persen	80.000.000	
2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	33 Pengaduan	7 Pengaduan	7 Pengaduan	5 Pengaduan	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	6 Pengaduan	80.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PER-SAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola	81 Persen	70,99	73 Persen	73 Persen	6.806.000.000						77 Persen	8.300.000.000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan kegiatan penanganan sampah Persentase Pengelolaan Sampah dengan kegiatan pengurangan sampah	70 Persen 30 Persen	51,35 Persen 19,64 Persen	70 Persen 30 Persen	70 Persen 30 Persen	6.806.000.000			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	70 Persen 30 Persen	8.300.000.000	

2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
						Jumlah Sa- rana dan Prasarana Pe- nanganan Sampah un- tuk Kegiatan Pemilahan, Pengum- pulan, Pengangku- tan, Pen- golahan, dan Pemrosesan Akhir	25 Unit	20 Unit	5 Unit	5 Unit	2.000.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmo- nis dengan lingkungan, alam, dan bu- daya serta peningkatan toleransi antarumat be- ragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pening- katan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Ling- kungan Hidup, Masyara kat	5 Unit	600.000.000	DINAS LING- KUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
						Jumlah doku- men ke- bijakan dan strategi dae- rah pengel- olaan sampah kabu- paten/kota yang disusun dan ditetap- kan	5 Doku- men	-	1 Doku- men	1 Doku- men	301.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmo- nis dengan lingkungan, alam, dan bu- daya serta peningkatan toleransi antarumat be- ragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pening- katan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Ling- kungan Hidup, Masyara kat	1 Doku- men	650.000.000	DINAS LING- KUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah														
						Jumlah fasilit- as pe- nanganan sampah yang beroperasi dan terpelih- ara dengan baik	125 Unit	-	25 Unit	25 Unit	600.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Keca- matan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmo- nis dengan lingkungan, alam, dan bu- daya serta peningkatan toleransi antarumat be- ragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Pening- katan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Ling- kungan Hidup, Masyara kat	25 Unit	1.650.000.000	DINAS LING- KUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														

						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	105.000 Ton	18.655,15 Ton	19.000 Ton	20000 Ton	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	21.000 Ton	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah														
						Persentase luas layanan pengumpulan sampah	60 Persentase	4 Persentase	4 Persentase	6 Persentase	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	10 Persentase	230.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan	1.430 Ton	279,74 Ton	300 Ton	300 Ton	600.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	340 Ton	770.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

						fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														
						Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	1 Laporan	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
						jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten/ kota atau TPA/ TPST Regional	105.000 Ton	18.655,15 Ton	19.000 Ton	20000 Ton	3.300.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	21.000 Ton	3.700.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah														

						Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	1.485 Ton	319,80 Ton	320 Ton	320 Ton	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	356 Ton	5.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah														
						Jumlah sampah yang terdaur ulang	30.660 Ton	4.354,51 Ton	4.400 Ton	4.400 Ton	1.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	6.000 Ton	650.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
J U M L A H											22.734.348.895								29.796.000.000

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan RENJA

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029. Masih terdapat banyak subkegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Renja tahun 2026 ini, meskipun telah masuk dalam program kegiatan yang direncanakan di dalam Renstra. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pertimbangan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memampuni dalam pelaksanaannya. Selain itu, adanya prioritas pengalokasian pagu anggaran untuk program kegiatan yang dianggap lebih penting untuk dapat didahulukan pelaksanaannya di tahun 2026. Ada pun pelaksanaan Renja tahun 2026 ini agar dapat direalisasikan dengan maksimal sesuai dengan target capaian dan pagu anggaran yang ditetapkan pada rancangan akhir (ranhir) RKPD, yang mana jika terdapat kekurangan anggaran agar dapat ditelaah dan diajukan penambahan pagu supaya pelaksanaan program kegiatan dapat tercapai sesuai target.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja 2025 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis, guna mendukung kerangka regulasi yang telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2026. Adapun KU-APBD dan PPA berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
2. Untuk menyusun rencana tindak bagi pencapaian prioritas pembangunan dan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait, maka setiap prioritas akan dikoordinasikan oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.

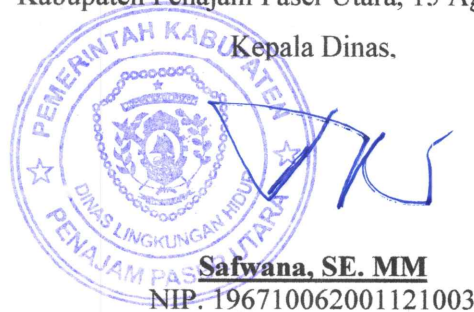
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi.
5. Kepala Bapelitbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing kepala perangkat daerah.
6. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2025.
7. Kepala Bapelitbang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala perangkat daerah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 ini disusun dengan bersumber dari tujuan, sasaran dan strategi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, serta mengacu pada RKPD dan Renstra yang telah tersusun sebelumnya. Rencana Kerja ini diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan program kegiatan yang tersusun di dalam dokumen ini. Dokumen ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kinerja perangkat daerah, yang dilaksanakan setiap triwulan, serta evaluasi tahunan pada akhir tahun 2026.

Kabupaten Penajam Paser Utara, 15 Agustus 2025

Kepala Dinas,



Safwana, SE. MM
NIP. 196710062001121003